

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2026.

Sebagaimana kita ketahui bersama, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2026 menguraikan program, rencana kegiatan dan sasaran tahunan berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dalam rangka mencapai tujuan dan misi visi Gubernur Jambi 2025-2029.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2026, merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and good governance) serta berorientasi kepada hasil (result oriented) sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2026 ini pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi OPD. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2026 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja dan diharapkan mampu memberikan manfaat serta dampak positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara informasi, evaluasi maupun sebagai parameter dalam peningkatan kinerja organisasi, bahwa dokumen ini belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, saran dan masukan yang konstruktif untuk melaksanakan tugas di masa mendatang sangat diharapkan.

Jambi, 15 Januari 2026

KEPALA BADAN,

Drs. H. ISMED WIJAYA, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19701025 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1 Tujuan dan Sasaran	13
3.2 Strategi dan Kebijakan	15
3.3 Program/Kegiatan dan Sasaran yang ingin dicapai	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	19
BAB V PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Provinsi Jambi yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada Rencana Startegis Pemerintah Provinsi Jambi 2025-2029 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk itu dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektifitas dan efesiensi perencanaan di Provinsi Jambi, sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and good governance) serta berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2026 ini pun pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi OPD. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk

melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran. Dalam aplikasinya, penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2026 ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan pengejawantahan semangat reformasi birokrasi yang menghendaki pencapaian maksimal dalam etos kerja.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2026 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun tersebut. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran stratejik akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misinya.

Sedangkan sasaran tahunan, ditetapkan setiap tahun yang disesuaikan dengan kondisi di internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi terutama dalam rangka mengakomodir kebutuhan pihak-pihak terkait dalam hal ini yang dijadikan sebagai kelompok sasaran baik organisasi Pemerintah Provinsi Jambi sendiri maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan manajemen operasionalnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra sesuai arahan dalam RKPD ;
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA ;

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2026.

Dalam tataran teknisnya, RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan salah satu bagian dokumen perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam pembuatan dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun terkait. RKPD inilah yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi dokumen anggaran dalam bentuk APBD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2026, ini disusun dengan mempedomani :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6. Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Renja Pembangunan Daerah tahun 2014.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017.
9. Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.
12. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun tersebut, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah menjamin keselarasan antara program, kegiatan, dan sub-kegiatan Kesbangpol dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2026 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat penjelasan latar belakang, landasan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan capaian renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun berjalan, hasil evaluasi mengacu pada hasil laporan kinerja.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan rencana program dan kegiatan tujuan, kelompok sasaran dan usulan program dan kegiatan pada OPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk memberikan, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik, gambaran umum program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja meningkatnya predikat SAKIP dalam pelaksanaan pelayanan dan jasa penunjang lainnya yang mempunyai 7 kegiatan.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan 1 kegiatan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan rincian 1 kegiatan.
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator kinerja persentase melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan rincian 1 kegiatan.
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan pembinaan dan

pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan rincian 1 kegiatan.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial indikator kinerja persentase pelaksanaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan rincian 1 kegiatan.

Dalam pelaksanaan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 yang dialokasikan sebesar Rp.21.880.640.033,- terealisasi sebesar Rp.20.040.127.848,- atau 92 %, dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.771.810	117.606.263	95
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.838.237.781	6.095.339.808	78
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.720.000	15.180.000	97
	4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.867.942	299.837.447	100
	5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.627.906	98.627.906	100
	6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	332.003.776	327.072.855	99
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.291.856	310.903.288	100
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.401.491.949	4.349.457.071	99
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	6.597.971.188	6.572.186.498	100

PROGRAM		KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI	
				(Rp)	%
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	794.768.816	789.768.300	99
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	348.005.305	347.468.700	100
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	716.881.704	716.679.712	100

Dan penjabaran sasaran yang ditetapkan dalam 6 (enam) program yang diuraikan dalam 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat dalam bidang Administrasi Perkantoran dan layanan lainnya.

Dalam upaya mencapai tujuan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat sehingga dapat dilayani dan difasilitasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Maka ditetapkan program dan sasaran sebagai berikut :

PROGRAM 1	SASARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Tersusunnya program kegiatan dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
	2. Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
	3. Terwujudnya pegawai memenuhi standar kompetensi jabatan melalui program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.
	4. Terpenuhinya ketersediaan bahan logistik harian, alat tulis kantor (ATK), dan perlengkapan lainnya untuk mendukung kelancaran tugas harian seluruh pegawai.
	5. Terwujudnya ketersediaan kendaraan dinas, mesin kantor, peralatan elektronik, dan furnitur yang memadai sesuai dengan standar sarana prasarana (SOP) untuk mendukung mobilitas dan produktivitas.
	6. Terpenuhinya kebutuhan jasa pendukung seperti administrasi, kebersihan, dan keamanan untuk mendukung kinerja aparatur.
	7. Terwujudnya seluruh aset penunjang operasional (seperti gedung kantor, kendaraan dinas, dan peralatan mesin) dalam kondisi baik dan siap pakai untuk mendukung kelancaran pelayanan publik.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Bela NKRI sehingga dapat memiliki Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang kuat. Untuk mencapai tujuan diatas, maka disusun program dan sasaran sebagai berikut :

PROGRAM 2	SASARAN
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terwujudnya penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

Supaya tujuan ini dapat tercapai, maka ditetapkan program dan sasaran sebagai berikut :

PRORGRAM 3	SASARAN
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Terlaksananya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Guna mencapai tujuan dimaksud, maka ditetapkan program dan sasaran sebagai berikut :

PROGRAM 4	SASARAN
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

PROGRAM 5	SASARAN
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi KUB dan penghayat kepercayaan

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

PROGRAM 6	SASARAN
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Terwujudnya peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing/TKA/ Lembaga asing serta penanganan konflik di daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari misi Gubernur Jambi yang terpilih. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu sampai dengan lima tahunan.

Dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode 2021-2024 melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung oleh rakyat (Rapat Pleno KPU Provinsi Jambi) pada tanggal 3 Juni 2021. Dimana Al Haris-Abdullah Sani meraih suara terbanyak dan dilantik pada tanggal 12 Juli Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia.

Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih periode 2021 – 2026 adalah :

“TERWUJUDNYA JAMBI LEBIH MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT, (JAMBI MANTAP)”

Sedangkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026 antara lain:

MISI PERTAMA : **Memantapkan Tata Kelola Pemerintah**

Yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung egovernment yang terintegrasi.

MISI KEDUA : **Memantapkan Perekonomian Masyarakat Daerah**

Yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber

daya alam dan komoditas unggulan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan local untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

MISI KETIGA : Memantapkan Kualitas SDM

Yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Ketigamisi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Jambi yang Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Provinsi Jambi, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan **Misi Ketiga** Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu :

“Mementapkan Kualitas SDM”

Dari misi ketiga tersebut, sasaran yang ingin di capai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah :

Memantapkan Perekonomian Masyarakat Daerah Melalui Kerukunan Antar Suku dan Antar Umat Beragama. Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Program Kegiatan yaitu:

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Serta di Dukung oleh Program-program yang lain.

Dalam rangka pengembangan misi guna mencapai visi yang telah dikemukakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021-2026, yaitu :

” Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Yang dinamis ”

Untuk mendukung tujuan diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021-2026, yaitu :

1. Terwujudnya Situasi Politik Daerah Yang Kondusif.
2. Terwujudnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis.

3.2 Strategi dan Kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang serta dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2021-2026 Menuju Jambi MANTAP. Pada tabel dibawah disajikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan untuk setiap Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Visi : Terwujudnya Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT			
Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintah			
Misi 3 : Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang dinamis berdasarkan Pancasila dan berwawasan kebangsaan	Meningkatnya penegakkan demokrasi, harmonisasi sosial, wawasan kebangsaan dan stabilitas daerah yang kondusif	Meningkatkan kualitas demokrasi, harmonisasi sosial, wawasan kebangsaan dan stabilitas daerah yang kondusif	Peningkatan kualitas pemahaman masyarakat terhadap penegakkan demokrasi serta pembinaan Ipoleksosbudkumham

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program kegiatan dalam periode 2025-2029.

Strategi

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan pengukuran pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan.
- 2) Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Daerah.
- 3) Meningkatkan Kualitas Demokrasi untuk Keamanan dan Stabilitas Daerah.

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung capaian kinerja
- 2) Peningkatan kualitas pembinaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM
- 3) Peningkatan Kualitas Pemahaman masyarakat terhadap penegakan demokrasi, menguatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi dalam tahun berjalan dengan menggunakan metode baru (*aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi*) serta penguatan rencana aksi gangguan keamanan dalam Provinsi Jambi.

3.3 Program / Kegiatan dan Sasaran yang ingin dicapai.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran dan target capaian kinerja dari instansi pemerintah yang maksimal baik kerjasama dengan masyarakat maupun Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Visi dan Misi yang diinginkan. Pada tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai 6 program dengan 12 kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Mempunyai 7 kegiatan terdiri dari 19 sub kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya persentase pelayanan administrasi perkantoran dan layanan lainnya.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
Mempunyai 1 kegiatan dengan 5 sub kegiatan dengan sasarannya adalah Terwujudnya penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
Mempunyai 1 kegiatan terdiri dari 5 sub kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Terlaksananya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
Mempunyai 1 kegiatan dengan 5 sub kegiatan yang memiliki sasaran yaitu terlaksananya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
Mempunyai 1 kegiatan terdiri dari 5 sub kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi FKUB dan penghayat kepercayaan.
6. Program Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
Mempunyai 1 kegiatan dengan 6 sub kegiatan yang sasarannya adalah Terwujudnya peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing/TKA/ Lembaga asing serta penanganan konflik di daerah serta forum koordinasi pimpinan daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2026 mengacu pada Renstra OPD dan RKPD tahun 2026, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mempunyai gambaran umum program dan kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.1 Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - 1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD.
 - 1.2 Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah.
 - 1.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - 1.2.2 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1.4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - 1.4.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - 1.4.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 1.4.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - 2.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 - 2.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

- 2.1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - 2.1.3 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 3. Program Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
 - 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
 - 3.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - 3.1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - 3.1.3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. Program Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - 4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - 4.1.1 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - 4.1.2 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - 4.1.3 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
5. Program Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
 - 5.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - 5.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - 5.1.2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

6. Program Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

6.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

6.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

6.1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

6.1.3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

6.1.4 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

Melalui 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dari setiap program dan kegiatan Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi disusun secara spesifik, realistis dilengkapi dengan indikator Kinerja dan target capaian kinerja yang terukur sehingga dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan, target kinerja dan sasaran kegiatan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu Program Kegiatan.

Program yang telah ditetapkan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah

daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk mengukur input dan output perlu indikator yang jelas setiap kegiatan, karena Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil , manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capai kinerja suatu program atau kegiatan.

Kelompok Sasaran memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2026 dapat dijabarkan dalam 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan sebagaimana daftar dibawah ini :

**Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Jambi**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8,01	BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAMBI				18.336.700.583				35.119.550.000
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Predikat SAKIP							
8 01 01 1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
8 01 01 1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Jambi	14 dokumen	66.000.000	APBD		14 dokumen	86.250.000
8 01 01 1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Jambi	14 laporan	120.098.256,72	APBD		14 laporan	230.000.000
8 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya adminisrasi keuangan perangkat daerah							
8 01 01 1.02.0001	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Jambi	50 orang	5.357.606.317	APBD		50 orang	8.800.000.000
8 01 01 1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Jambi	16 dokumen	213.006.279	APBD		16 dokumen	260.500.000
08.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prov. Jambi	-	-	APBD		12 dokumen	264.000.000
08.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Jambi	-	-	APBD		1 laporan	70.000.000

08.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Prov. Jambi	-	-	APBD		64 dokumen	150.000.000
8 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertatanya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Prov. Jambi	-	-			82 paket	70.000.000
8 01 01 1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prov. Jambi	14 orang	36.684.552	APBD		14 orang	46.300.000
8 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah							
8 01 01 1.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov. Jambi	1 paket	25.095.250	APBD		1 paket	43.700.000
8 01 01 1.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prov. Jambi	1 paket	39.709.725	APBD		1 paket	72.500.000
8 01 01 1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Prov. Jambi	12 dokumen	472.800	APBD		12 dokumen	19.500.000
8 01 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Jambi	-	-			10 laporan	75.000.000
8 01 01 1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Jambi	4 laporan	252.985.743	APBD		4 laporan	480.500.000
8 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terakomodir Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
8 01 01 1.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Prov. Jambi	-	-			1 mobil 2 Motor	800.000.000
8 01 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Prov. Jambi	-	-			1 mobil	500.000.000
8 01 01 1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prov. Jambi	22 unit	122.183.298,28	APBD		22 unit	280.000.000
8 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
8 01 01 1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Jambi	1 laporan	5.000.000	APBD		1 laporan	8.600.000

8 01 01 1.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov. Jambi	4 laporan	183.233.500	APBD		4 laporan	250.000.000
8 01 01 1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Jambi	4 laporan	416.038.821	APBD		4 laporan	265.000.000
8 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
8 01 01 1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prov. Jambi	20 unit	214.320.000	APBD		20 unit	300.000.000
8 01 01 1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prov. Jambi	90 unit	73.134.800	APBD		90 unit	123.500.000
8 01 01 1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Jambi	2 unit	68.115.200	APBD		2 unit	195.000.000
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Prov. Jambi						
8 01 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Bela NKRI							
8 01 02 1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Prov. Jambi	-	-	APBD		6 dokumen	450.000.000
8 01 02 1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Prov. Jambi	-	-	APBD		5 kebijakan	300.000.000
8 01 02 1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Jambi	150 orang	2.296.805.866	APBD		150 orang	4.600.000.000

8 01 02 1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Jambi	300 orang	430.615.200	APBD		300 orang	2.800.000.000
8 01 02 1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Jambi	7 laporan	166.218.100	APBD		7 laporan	550.000.000
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik							
8 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase terlaksana Kebijakan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							
8 01 03 1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Prov. Jambi	-	-	APBD		6 dokumen	300.500.000
8 01 03 1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Prov. Jambi	-	-	APBD		4 kebijakan	250.000.000

8 01 03 1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Jambi	500 orang	5.803.518.890	APBD		500 orang	6.500.000.000
8 01 03 1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Jambi	90 orang	211.220.254	APBD		90 orang	650.000.000
8 01 03 1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Jambi	13 laporan	150.903.500	APBD		13 laporan	110.500.000
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan							
8 01 04 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan							
8 01 04 1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Prov. Jambi	4 dokumen	113.625.800	APBD		4 dokumen	250.000.000
8 01 04 1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Prov. Jambi	-	-	APBD		5 dokumen	250.000.000

8 01 04 1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Jambi	125 ormas	366.289.984	APBD		125 ormas	795.000.000
8 01 04 1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Jambi	11 orang	173.304.443	APBD		11 orang	63.200.000
8 01 04 1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Jambi	-	-	APBD		4 laporan	250.000.000
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya							
8 01 05 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi KUB dan penghayat kepercayaan							
8 01 05 1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Prov. Jambi	9 dokumen	326.979.763	APBD		9 dokumen	200.000.000
8 01 05 1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Prov. Jambi	-	-	APBD		6 dokumen	200.000.000

8 01 05 1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Jambi	3 orang	294.419.618	APBD		3 orang	500.000.000
8 01 05 1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Jambi	-	-	APBD		5 orang	110.000.000
8 01 05 1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Jambi	-	-	APBD		4 laporan	200.000.000
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial							
8 01 06 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							
8 01 06 1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Prov. Jambi	-	-	APBD		10 dokumen	200.000.000
8 01 06 1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Prov. Jambi	-	-	APBD		15 dokumen	300.000.000

8 01 06 1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Jambi	13 orang	482.952.576	APBD		13 orang	950.000.000
8 01 06 1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Jambi	20 orang	33.016.967	APBD		20 orang	150.000.000
8 01 06 1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Jambi	11 laporan	33.025.080	APBD		11 laporan	150.000.000
8 01 06 1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Prov. Jambi	10 dokumen	260.120.000	APBD		10 dokumen	650.000.000

BAB V

PENUTUP

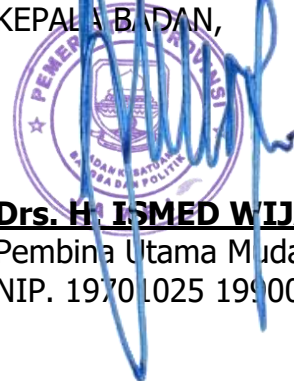
Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Semua Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah merupakan pokok pikiran dan rumusan skala prioritas yang mungkin dapat diupayakan dilaksanakan dengan mempertimbangkan semua program dan kegiatan.

Demikian dokumen Rencana Kerja Kantor Kesbangpol Tahun 2026 ini dibuat. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa dan politik. Atas perhatian dan dukungan semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Jambi, 15 Januari 2026

KEPALA BADAN,



Drs. H. ISMED WIJAYA, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 197010251990031002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI



RENCANA KERJA (**RENJA**)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK